

**PENGARUH PELATIHAN KERJA APARATUR  
PEMERINTAH NAGARI TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :**

**HERLINDA NOVITA WARDANI  
TM/NIM : 2015/15042032**

**PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari  
Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten  
Tanah Datar

**Nama** : Herlinda Novita Wardani

**Nim/TM** : 15042032/2015

**Program Studi** : Administrasi Publik

**Jurusan** : Administrasi Publik

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2019

Disetujui oleh:  
Pembimbing



**Drs. Syamsir, M.Si Ph.D**  
NIP. 19630401198903 1 003

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

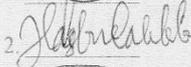
**Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari Terhadap Pengelolaan  
Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Herlinda Novita Wardani  
NIM : 15042032  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

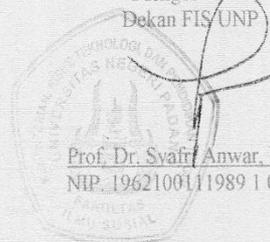
Padang, 26 Februari 2019

Tim Penguji,

Nama  
1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D  
2. Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S. Sos., M. Si  
3. Anggota : Zikri Alhadi, S. IP., M.A

Tanda Tangan  
1.   
2.   
3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS/UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 1962100111989 1 002

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlinda Novita Wardani

NIM / TM : 15042032/ 2015

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Kandang / 17 November 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Herlinda Novita Wardani  
NIM. 15042032/2015

## ABSTRAK

### **Herlinda Novita Wardani (150420322) : Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja aparatur pemerintah nagari terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena kurang efektifnya pelatihan kerja yang diberikan kepada aparatur pemerintah nagari sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan keuangan nagari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari walinagari, sekretaris nagari, bendahara nagari dan lima kepala urusan nagari. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 240 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dan pengambilannya dilakukan melalui teknik *Multistage Random Sampling*. Data dikumpulkan melalui angket dengan menggunakan pengukuran *skala likert*. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan nagari dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai *Adjusted R Square* 0,101%. Dengan demikian, pengaruh variabel pelatihan kerja terhadap pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 10,1%. Sedangkan sisanya 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain agar aparatur pemerintah nagari lebih meningkatkan pelatihan kerja dalam pengelolaan keuangan nagari untuk mencapai kategori “sangat baik” sehingga terciptanya pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

**Kata kunci:** *Pelatihan kerja, kinerja, pengelolaan keuangan nagari.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP., MA selaku dosen penguji II.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

6. Seluruh staff karyawan dan karyawan perempuan kepastakaan dan staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Herman Syahrul dan Ibunda Ida Harnelis terima kasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, pengorbanan dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Arif, Rian, Winda dan Windi, adik tersayang yang selalu memberikan bantuan dan semangatnya.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
10. Teman-teman Sepenelitian 2018 yang berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015, Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Padang, Februari 2019

Herlinda Novita Wardani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	9
1. Kinerja .....	9
2. Pelatihan .....	16
3. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja.....	23
B. Aparatur Pemerintah Nagari .....	24
C. Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa .....	31
D. Indikator Pengukuran Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	37
E. Penelitian Terdahulu .....	38
F. Kerangka Konseptual .....	40
G. Hipotesis Penelitian .....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Operasionalisasi Variabel.....	44
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Jenis, Teknis dan Alat Pengumpulan Data.....	50
G. Validitas dan Realibilitas .....	51
H. Teknis Analisis Data .....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	60
B. Profil Responden .....	63
C. Temuan Khusus .....	69
D. Pembahasan .....	93
E. Keterbatasan Penelitian .....	98

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Table 3.1 Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar .....	48
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel .....	50
Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Pelatihan .....	52
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	53
Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Variabel Pelatihan .....	54
Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	55
Tabel 4.1 Profil Responden Menurut Klarifikasi Umur .....	64
Tabel 4.2 Profil Responden Menurut Jenis Kelamin .....	65
Tabel 4.3 Profil Responden Menurut Status Perkawinan .....	65
Tabel 4.4 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir .....	66
Tabel 4.5 Profil Responden Menurut Jabatan .....	67
Tabel 4.6 Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih .....	67
Tabel 4.7 Profil Responden Menurut Masa Kerja .....	68
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Pelatihan Kerja .....	69
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Transparansi .....	70
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Akuntabilitas .....	71
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Partisipasi .....	72
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Tertib dan Disiplin Anggaran .....	73
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	74
Tabel 4.14 Hasil Kontribusi (R) Variabel Fasilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	75
Tabel 4.15 Hasil Uji Anova (F) Variabel Fasilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	76
Tabel 4.16 Hasil Uji T Variabel Fasilitas terhadap Pengelolaan Kuangan Nagari	76
Tabel 4.17 Hasil Kontribusi (R) Variabel Bahan Pendukung terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	77

Tabel 4.18 Hasil Uji Anova (F) Variabel Bahan Pendukung terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	78
Tabel 4.19 Hasil Uji T Variabel Bahan Pendukung terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	78
Tabel 4.20 Hasil Kontribusi (R) Variabel Materi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	79
Tabel 4.21 Hasil Uji Anova (F) Variabel Materi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	79
Tabel 4.22 Hasil Uji T Variabel Materi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .	80
Tabel 4.23 Hasil Kontribusi (R) Variabel Instruktur terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	81
Tabel 4.24 Hasil Uji Anova (F) Variabel Instruktur terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	81
Tabel 4.25 Hasil Uji T Variabel Instruktur terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	82
Tabel 4.26 Hasil Kontribusi (R) Variabel Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	83
Tabel 4.27 Hasil Uji Anova (F) Variabel Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	83
Tabel 4.28 Hasil Uji T Variabel Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	84
Tabel 4.29 Hasil Kontribusi (R) Variabel Metode terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	85
Tabel 4.30 Hasil Uji Anova (F) Variabel Metode terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	85
Tabel 4.31 Hasil Uji T Variabel Metode terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	86
Tabel 4.32 Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ..	89
Tabel 4.33 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ..	90

Tabel 4.34 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Variabel Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ..	91
Tabel 4.35 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Variabel Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ...	91

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....	63
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Nagari .....	87
Gambar 4.3 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	87
Gambar 4.4 Hasil Heteroskedastisitas Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	88
Gambar 4.5 Pengaruh dan Kontribusi Variabel X terhadap Y.....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran**

Lampiran Angket Penelitian

Lampiran Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Lampiran Hasil Profil Responden

Lampiran Hasil Penelitian

Lampiran Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian

Lampiran Biodata Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam memastikan terlaksananya pembangunan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan umumnya dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya dijelaskan pula keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Di samping itu Muhammad (2007: 32) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Indonesia dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang urusan pemerintahan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dapat melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Maka untuk itu pemerintah desa sepatutnya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang mana semua itu harus dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya batas masa pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Kemudian menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 2 ayat 1 diatur bahwa keuangan nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Walaupun demikian, dilapangan masih ditemukan adanya persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu contohnya adalah di Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar, yang mana Walinagari sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan nagari tidak terbuka dalam pelaporan keuangan nagari

sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan keuangan nagari (Irsyad,2017). Padahal semuanya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati bahwa Walinagari harus terbuka kepada masyarakat tentang keuangan nagari, hal ini dinyatakan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan nagari. Selain itu masalah utama dalam pengelolaan keuangan nagari adalah tidak adanya transparansi aset nagari oleh pemerintah seperti kebun nagari dan DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya sama sekali kepada masyarakat(Warta Andalas, 2015).

Masalah lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan nagari yaitu terjadinya penyimpangan terhadap proyek yang sedang berjalan di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Disamping itu masih banyak dari perangkat nagari tidak mengerti akan cara atau sistem pengerjaan proyek yang berstandar Dinas Pekerjaan Umum dengan dibuktikan adanya beberapa format laporan keuangan yang berbeda-beda (Dwi, 2017). Selanjutnya, masalah lain juga muncul dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman teknis perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, sehingga terhambat dalam proses penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian juga kurangnya pemberian pelatihan mengenai pengelolaan keuangan nagari dan banyak aparatur pemerintah nagari yang tidak mengerti dengan materi pelatihan yang diberikan dan materi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh aparatur pemerintah nagari (Pemkab.Tanah Datar, 2017).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afdalisman selaku Sekretaris Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 selama mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan nagari fasilitas yang diberikan kurang memadai, hanya diberikan buku dan pena. Selanjutnya menurut Bapak H. Syafwardi. A selaku Walinagari Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, baru Kepala Urusan Pembangunan yang diberikan pelatihan yang pada waktu itu dilakukan di Kabupaten sementara Bendahara Nagari tidak pernah sama sekali diberikan pelatihan sehingga bendahara hanya menggunakan system keuangan manual, maka kami butuh pemberian pelatihan oleh Dinas-dinas terkait. Selain itu menurut Ibuk Siska Amelia selaku Bendahara Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan, waktu pelaksanaan pelatihan yang diadakan oleh Badan Keungan Daerah tidak tepat pada waktunya sehingga sulit untuk menyesuaikannya dengan pekerjaan kantor yang sedang menumpuk. Kemudian berdasarkan hasil FGD (focus group discussion) pada tanggal 20 Agustus 2018 di kantor Walinagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan menurut Bapak Emrizal selaku kepala pembangunan:

“....memang banyak bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait kepada aparaturnya pemerintah nagari, tapi selama ini kami merasakan pelatihan itu tidak memberikan masukan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan nagari. Waktu yang diberikan untuk pelatihan sangat sedikit sekali, sekitar kurang lebih 2 hari, sedangkan materi yang disampaikan oleh pemateri berkisar itu ke itu saja tiap tahun, sehingga kebanyakan dari peserta lebih fokus ke ganget mereka masing-masing tanpa mengindahkan arahan dari pemateri, bahkan tidak ada pemantauan lebih lanjut dari hasil pelatihan yang diberikan itu”.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa terdapat hasil penelitian yang mengatakan bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dkk(2016) dengan judul pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Padma Ardy Aktuarial Jakarta, dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kemudian penelitian oleh Ni Wayan (2017) meneliti pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Buleleng, dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, selanjutnya penelitian Andi dkk (2017) meneliti pengaruh pelatihan, disiplin dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan, disiplin dan motivasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir ada juga terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013) meneliti pengaruh pelatihan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Sucofindo (Persero) Surabaya, dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan motivasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar dengan

judul **“Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset nagari pada beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Masih adanya aparatur pemerintah nagari yang tidak mengerti bagaimana cara atau sistem pengerjaan suatu proyek yang berstandar Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman teknis aparatur pemerintah nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
4. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada aparatur pemerintah nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
5. Masih banyak aparatur pemerintah nagari yang tidak mengerti dengan materi pelatihan yang diberikan karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
6. Kurang memadainya fasilitas yang tersedia pada saat pelatihan yang dilaksanakan.
7. Kurang tepatnya waktu pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada aparatur pemerintah nagari dalam mengelola keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi masalah pada “Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya yaitu “Apakah terdapat Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam pengetahuan di jurusan Administrasi Publik khususnya di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan Publik.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Pemerintah: Dapat menambah pengetahuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait pelatihan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari.
- b. Bagi Masyarakat: Sebagai informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kinerja dengan diadakannya pelatihan kerja dalam pengelolaan keuangan.
- c. Bagi Peneliti: Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana Adaministrasi Publik pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.